

MODEL KINERJA KOPERASI MASYARAKAT PESISIR
*(Studi Koperasi Pada Tiga Kabupaten Kawasan Pesisir
 di Sulawesi Selatan)*

Oleh

Muhlis Ruslan

E-mail: muhlis_ruslan@yahoo.co.id

Dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Bosowa

ABSTRAK

Kinerja koperasi masyarakat pesisir diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kesejahteraan anggota melalui kinerja kelembagaan koperasi pada tiga kawasan pesisir di Sulawesi Selatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus digunakan untuk menguji kinerja kelembagaan, dan kesejahteraan anggota. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis SEM (*Structural Equation Modelling*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kelembagaan koperasi ditandai dengan pertumbuhan usaha yang dijalankan, pertambahan hasil usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, perkembangan jumlah usaha yang dikelola koperasi, tingkat pertambahan jumlah anggota, tingkat pertambahan penyertaan modal anggota, tingkat pertambahan pendapatan anggota, tingkat perkembangan sisa hasil usaha (SHU), tingkat efisiensi pengelolaan hasil usaha, dan tingkat penerimaan SHU tepat waktu. Kesejahteraan anggota ditandai dengan peluang membiayai pendidikan anggota koperasi, peluang memenuhi kebutuhan mengikuti jenjang pendidikan anggota, peluang memenuhi kebutuhan mengikuti kegiatan kursus keterampilan bagi anggota, tingkat kelancaran dan produktivitas usaha anggota, perkembangan pangsa pasar, peningkatan volume penjualan, dan peningkatan penghasilan usaha anggota.

Kata Kunci: Masyarakat Pesisir, Kinerja Lembaga Koperasi, dan Kesejahteraan Anggota.

A. PENDAHULUAN

Lembaga koperasi merupakan salah satu unit ekonomi yang banyak mengalami perkembangan cukup pesat di Indonesia. Keberadaan lembaga koperasi telah banyak berperan di dalam pembangunan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mampu menyatukan masyarakat. Dasar hukum keberadaannya di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, hal itu sejalan dengan pasal 1 UU No.25/1992 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Fungsi dan peran koperasi sesuai dengan UU No.25/1992 tentang perkoperasian adalah

membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperanserta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan data yang terhimpun, jumlah Koperasi di Indonesia sampai akhir tahun 2015 menyentuh angka 212.135 unit. Namun berdasarkan pendataan, koperasi yang aktif hanya 150.223 unit. Jumlah tersebut didapatkan melalui pemuktahiran data koperasi yang dilakukan dengan Online Database System. Reorientasi, yaitu upaya sistematis untuk merubah paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas.

Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas koperasi adalah: Membangun Koperasi Berbasis Informasi Teknologi (IT); Melalui kerjasama dengan Notaris sudah dapat dilakukan penerbitan akte koperasi secara online. Proses pendirian koperasi semakin mudah, cepat, dan efisien. Koperasi juga difasilitasi untuk melakukan RAT secara Online. Demikian juga proses Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Dalam reorientasi juga dilakukan penguatan kelembagaan koperasi, serta mendorong koperasi meningkatkan jumlah anggota koperasi. Pengembangan, merupakan agenda permanen yang meliputi upaya: mengkaji regulasi yang menghambat berkembang koperasi; memperkuat akses pembiayaan, dengan menyiapkan koperasi untuk menjadi penyalur KUR; Selanjutnya dikembangkan koperasi sektor riil khususnya yang berorientasi ekspor, padat karya dan memanfaatkan digital ekonomi. Gerakan dan kesadaran untuk reformasi total tersebut, tidak harus berupa kegiatan yang seragam dan monoton namun hendaknya bersifat serentak, dengan dukungan komitmen dan kerjasama semua pihak yang meliputi pemerintah, dunia usaha, lingkungan akademisi serta seluruh komponen masyarakat. Pemerintah akan terus hadir dan berkomitmen untuk membangun koperasi melalui berbagai kebijakan dan program, dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kewirausahaan, peningkatan akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran, manajemen dan teknologi informasi. Puspayoga (2016).

Kelembagaan koperasi yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya pada tiga wilayah daerah pesisir Kabupaten/Kota, yakni Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM (BPS Makassar Dalam Angka, 2015), bahwa Kota Makassar mempunyai 14 Kecamatan memiliki sejumlah 795 unit koperasi yang masih aktif dengan jumlah anggota 3.344 orang, Kabupaten Pangkep memiliki 13 Kecamatan dan terdapat 15 unit koperasi dengan jumlah anggota 2.901 orang (BPS Pangkep Dalam Angka, 2015) dan Kabupaten Takalar memiliki 9 Kecamatan dan terdapat 333 unit koperasi dengan jumlah anggota 26.265 orang (BPS Takalar Dalam Angka, 2015).

Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel menjadikan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sebagai pilar perekonomian Sulsel jelang 2018. Membangun Sulsel ternyata tak cukup dengan modal sumberdaya tersebut tapi butuh syarat lain; yaitu kekuatan pilar norma (sosial) yang mengayomi serta organisasi (ekonomi) yang mumpuni. Pilar aturan yang dibingkai dalam satu organisasi berbasis ekonomi kerakyatan. Lalu di manakah pilar itu bisa diwujudkan sebagai basis penggerak kemajuan Sulsel. Sulsel sesungguhnya masuk ke dalam provinsi yang dikategorikan berkembang pencapaian koperasinya bersama tujuh provinsi lain, Sumbar, Yogyakarta, Bali, NTB, Gorontalo, Sultra, sayangnya, ini berbarengan jumlah koperasi yang jeblok atau tidak aktif. BPS mencatat bahwa pada rentang 2006 hingga 2014 jumlah koperasi yang ada di Sulawesi Selatan sangat besar namun tak banyak yang tak sehat.

Pada tahun 2006 terdapat 4.761 yang aktif dari puluhan ribu yang ada, tahun 2007 sebanyak 5.252, tahun 2008 ada 5.327 dan di tahun 2014 justru menurun menjadi 5.051. Hingga 2015, tak kurang dari 7.700 koperasi yang telah terdaftar. Namun, ada sekitar 2.000 koperasi mulai limbung atau tidak aktif. Menurunnya kinerja koperasi disebabkan oleh beberapa faktor eksternal. Mereka punya visi tetapi tak sadar kalau mereka tak punya kapasitas merealisasi-kannya. Pemerintah yang diharapkan sebagai penolong malah menjerumuskan ke dalam ketergantungan sistemik, ketergantungan yang diskenarioikan sebagai proyek tahunan, atau bantuan berbasis APBD/APBN. Muaranya pemberdayaan semu. AM Yamin 2013.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan koperasi cukup pesat di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya akan tetapi dalam perkembangannya masih terdapat sejumlah permasalahan-permasalahan yang dihadapi apalagi kelembagaan koperasi yang berada pada wilayah pesisir. Peneliti menilai bahwa begitu besarnya potensi keberadaan koperasi pada wilayah tersebut di atas seyogyanya dapat menjadi suatu aset besar bagi masyarakat pesisir dalam upaya memperbaiki taraf hidup mereka secara ekonomi. Akan tetapi keberadaan koperasi di Sulawesi Selatan belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota/masyarakatnya. Oleh

karena itu, koperasi pada wilayah pesisir perlu mendapat perhatian tentang keberadaannya dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya serta penataan kelembagaannya. Hal tersebut sejalan dengan visi Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni “Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai pilar utama perekonomian Sulawesi Selatan Tahun 2018.

Pemberdayaan ekonomi nelayan melalui penguatan kelembagaan koperasi merupakan solusi yang sangat strategis dan relevan. Secara individu masyarakat pesisir sangat sulit berkembang karena lemahnya kekuatan pasar yang dimiliki, ketidakpastian pendapatan, kelembagaan koperasi yang masih lemah, termasuk kebutuhan modal. Fenomena tersebut di atas telah terjadi pada koperasi umumnya, dan khususnya koperasi yang berada pada wilayah pesisir. Bantuan dan kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi koperasi belum memperlihatkan kinerjanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal ini koperasi yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar, hal itulah yang menjadi menarik untuk dikaji penulis dalam penelitian ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tiga kawasan pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar dengan pertimbangan bahwa ketiga lokasi tersebut mewakili kawasan pesisir di Sulawesi Selatan, selain itu Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar masing merumuskan dalam rumusan visi dan misi pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan.



1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanasi yang tergolong dalam penelitian asosiatif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. (Sugiono,2012). Dengan penelitian ini akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala yang terjadi. Ditinjau dari metode, penelitian ini tergolong penelitian survey, yakni untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah dengan melakukan pengumpulan data dengan mengedarkan kuesioner, wawancara terstruktur. Menurut Zikmund (1994) metode penelitian survei adalah satu bentuk teknik penelitian di mana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang, melalui pertanyaan-pertanyaan, dan metode *ex post facto*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan dalam wujud kuesioner yang didasarkan pada skala pengukuran kuantitatif yang sifatnya ordinal yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Sebelum digunakan sebagai alat pengumpul dan pengukur data yang digunakan dalam kajian ini, maka sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk menentukan layak tidaknya instrumen dalam pengukuran data.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, dimana dikatakan validnya suatu item pertanyaan dalam kuesioner apabila memiliki nilai koefisien korelasi diatas dari 0,30. Imam Ghozali, (2009).

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 Nunnally, (2009).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan daftar pertanyaan (kuesioner) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan maksud untuk mengungkap fenomena keberadaan lembaga koperasi dalam melakukan fungsinya. Oleh sebab itu penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif, yaitu dalam bentuk angka dari hasil kuesioner yang diangkan (*scoring*). Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *proporsional random sampling*. Sugiyono (2012).

Objek penelitian ini adalah jumlah koperasi pada wilayah pesisir Kota Makassar dengan menganalisis kinerja koperasi. Dalam kajian penelitian ini, dijelaskan pada tabel sebagai berikut

Tabel 1.
Jumlah Koperasi Anggota Pada Wilayah Pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep

Kota/Kabupaten	Koperasi	
	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
Kota Makassar		
1. Kec.Tamalate	140	1.657
2. Kec.Ujung Tanah	30	836
3. Kec.Biringkanaya	64	126
Jumlah	234	2.619
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		
1. Kec.Pangkajene	2	169
2. Kec. Bungoro	2	849
3. Kec. Labakkang	2	205
Jumlah	6	1.223
Kabupaten Takalar		
1. Kec.Galesong Utara	33	5.041
2. Kec.Galesong Selatan	27	1.996
Jumlah	60	7.037

Sumber: Data Diolah, 2017

Untuk lebih jelasnya jumlah populasi anggota koperasi pada 3 wilayah pesisir, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Jumlah Populasi Anggota Koperasi Menurut Kota/Kabupaten

Kota/Kabupaten	Koperasi	
	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
Kota Makassar	234	2.619
Kab.Pangkajene dan Kepulauan	6	1.223
Kab. Takalar	60	7.037
Jumlah	300	10.879

Sumber : Data Diolah, 2017

Selanjutnya karakteristik sampel anggota koperasi pada 3 wilayah penelitian, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.
Karakteristik Sampel Anggota Koperasi Menurut Kota/Kabupaten

Kabupaten/ Kota	Anggota Koperasi		
	Sampel Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
Kota Makassar	65	48	17
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	30	19	11
Kabupaten Takalar	175	124	51
Total	270	191	79

Sumber : Data Diolah, 2017

4. Teknik Analisis Data

a. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk ukuran sampel adalah 5-10 kali jumlah variabel manifest (indikator) dari keseluruhan variabel laten. Adapun jumlah indikator pada masing-masing variabel laten sebanyak 9 dengan jumlah variabel konstruk atau laten sebanyak 6, sehingga jumlah indikator atau variabel manifest adalah sebanyak minimal 5 x 54 atau maksimal 10 x 54. Dalam kajian ini digunakan jumlah sampel minimal yaitu sebanyak 270 responden dari 10879 populasi.

Populasi penelitian ini meliputi seluruh anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar yang berjumlah 10.879 anggota. Jumlah sampel ditentukan didasarkan pada pendapat Solimun (2002:83) dan Sugiono (2012) bahwa: keterwakilan populasi oleh sampel dalam penelitian merupakan syarat penting untuk melakukan generalisasi. penggunaan model persamaan struktural

(*Structural Equation Modeling*), maka bila ukuran sampel terlalu besar maka model menjadi sangat sensitif sehingga sulit untuk mendapatkan *goodness of fit* yang baik. Untuk itu disarankan untuk ukuran sampel adalah 5-10 kali jumlah variabel manifest (indikator) dari keseluruhan variabel laten. Adapun jumlah indikator pada masing-masing variabel laten sebanyak 9 dengan jumlah variabel konstruk atau laten sebanyak 6, sehingga jumlah indikator atau variabel manifest adalah sebanyak minimal 5 x 54 atau maksimal 10 x 54. Dalam kajian ini digunakan jumlah sampel minimal yaitu sebanyak 270 responden. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah sampel pada masing-masing kota, dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.
Pengambilan Sampel Anggota Koperasi
Menurut Kota/Kabupaten

Kota/Kabupaten	Koperasi	
	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel Kota/Kabupaten
Kota Makassar		
Tamalate	1657	2619/10879 x 270 = 65
Ujung Tanah	836	
Biringkanaya	126	
Jumlah	2.619	
Kab. Pangkajene dan Kepulauan		
Pangkajene	169	1223/10879 x 270 = 30
Bungoro	849	
Labbakang	205	
Jumlah	1.223	
Kab. Takalar		
Galesong Utara	5041	7037/10879 x 270 = 175
Galesong Selatan	1996	
Jumlah	7037	
Total	10.879	270

Sumber: Data Diolah, 2017

b. Teknik Analisis SEM (*Structural Equation Modelling*)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis SEM (*Structural Equation Modelling*) yang dioperasikan melalui program Lisrel 8,80 dengan bantuan software SPSS. Teknik analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)*, dilakukan untuk menjelaskan secara menyeluruh hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian. Oleh karena itu, syarat utama menggunakan SEM adalah membangun suatu model hipotesis

yang terdiri dari model struktural dan model pengukuran dalam bentuk diagram jalur yang berdasarkan justifikasi teori. Dua alasan yang mendasari digunakannya SEM adalah (1) SEM mempunyai kemampuan untuk mengestimasi hubungan antar variabel yang bersifat *multiple relationship*. Hubungan ini dibentuk dalam model struktural (hubungan antara konstruk dependen dan independen). (2) SEM mempunyai kemampuan untuk menggambarkan pola hubungan antara konstruk laten dan variabel manifest atau variabel indikator. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan uji validitas untuk mengetahui valid tidaknya masing-masing indikator yang digunakan dalam variabel penelitian. Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrument bersangkutan yang mampu mengukur apa yang akan diukur, Arikunto (1995) dan Solimun, 2002.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata; selalu, sering, kadang kala, jarang, dan tidak pernah. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor nilai; 5,4,3,2,1. Artinya selalu (SL) nilainya 5, sering (SR) nilainya 4, kadang kala (KK) nilainya 3, jarang (JR) nilainya 2, dan tidak pernah (TP) nilainya 1. Dari data interval tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode *rating-scala*. Artinya untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena kelembagaan. Sugiyono (2012).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Kelembagaan Koperasi

a. Persepsi Responden Variabel Kinerja Koperasi

Persepsi responden terhadap kinerja lembaga koperasi (Y) dengan indikator pertumbuhan usaha yang dijalankan koperasi (Y_1), penambahan hasil usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu (Y_2), pengembangan jumlah usaha yang dikelola koperasi (Y_3), tingkat pertambahan jumlah anggota koperasi (Y_4), tingkat pertambahan penyertaan modal anggota (Y_5), tingkat pertambahan pendapatan anggota (Y_6), tingkat perkembangan SHU (Y_7), tingkat efisiensi pengelolaan SHU (Y_8), dan tingkat penerimaan SHU tepat waktu (Y_9).

Dari 9 indikator dari 270 responden, rata-rata responden menjawab tidak pernah sebanyak 4 responden atau 1,6% yang menilai 9 (sembilan) indikator kinerja lembaga koperasi, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa keberadaan koperasi hanya sebatas menjalankan aktifitasnya sebagai lembaga koperasi, selain itu disebabkan oleh belum kuatnya kesadaran koperasi pada pentingnya mengembangkan usaha, pentingnya penyertaan modal anggota, dan pentingnya penambahan jumlah anggota sebagai ukuran terwujudnya kinerja kelembagaan koperasi sebagai konsekuensi jati diri berkoperasi.

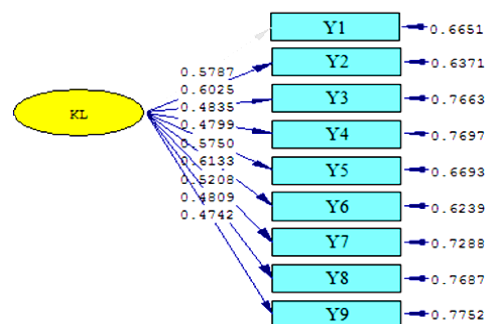
Selain itu, terdapat 34 responden atau 12,7% yang menilai 9 (sembilan) indikator kinerja lembaga koperasi yang menyatakan jarang, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa lembaga koperasi lebih didasarkan pada ketidak efisiensinya mengelola usaha koperasi dan mengelola SHU, padahal kinerja merupakan tentang bagaimana melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan dan bagaimana cara mengerjakannya. Terdapat 69 responden atau 25,4% yang menilai 9 (sembilan) indikator kinerja lembaga koperasi yang menyatakan kadang kala, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa keberadaan kelembagaan koperasi hanya sebatas penambahan penyertaan modal anggota belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja lembaga yang merupakan jawaban dari berhasilnya tujuan lembaga koperasi.

Selanjutnya 92 responden atau 34,0% yang menilai 9 (sembilan) indikator kinerja lembaga koperasi yang menyatakan sering, Fakta hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bertambahnya anggota koperasi serta bertambahnya penyertaan modal koperasi dari anggota mengindikasikan adanya kepercayaan mengelola usaha koperasi dan ketetapan mengelola SHU, dan terdapat 71 responden atau 26,3% yang menilai 9 (sembilan) indikator kinerja lembaga koperasi yang menyatakan sering, fakta ini memberi informasi bawa pertumbuhan dan perkembangan usaha dan jumlah anggota meningkat serta penyertaan modal meningkat, hal ini mengindikasikan kinerja lembaga koperasi telah melaksanakan kewajibannya dalam penetapan pembagian SHU yang sudah ditetapkan sebagai berikut; 1) Untuk jasa

anggota adalah sebesar 45% terdiri dari 20% untuk jasa modal dan 25% untuk jasa peminjaman. 2) Untuk jasa cadangan adalah sebesar 25%. 3) Untuk jasa pengurus adalah sebesar 10%. 4) Untuk dana pendidikan adalah sebesar 5%. 5) Untuk dana sosial adalah sebesar 5%. 6) Untuk dana kesejahteraan pegawai adalah sebesar 5%. 7) Untuk dana pembangunan daerah kerja sebesar 5%,memberi menjawab selalu.

b. Model Pengukuran Model Pengukuran Kinerja Lembaga Koperasi

Model pengukuran variabel Kinerja Lembaga Koperasi (Y) terdiri dari tiga dimensi, yaitu: Perkembangan Usaha (Y₁), Perkembangan Jumlah Anggota (Y₂), dan Pengembangan SHU (Y₃). Selanjutnya hubungan dimensi dalam membentuk variabel Kinerja Lembaga Koperasi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Diagram Jalur Model Kinerja Lembaga Koperasi

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari sembilan indikator yang membangun variabel Kinerja Lembaga Koperasi, terdapat beberapa variabel manives yang memiliki kontribusi yang dominan, yaitu: Y₆ (Pertambahan Pendapatan Anggota) dan Y₂ (Hasil Usaha Dalam Kurun Waktu Tertentu).

2. Analisis Deskriptif Kesejahteraan Anggota

a. Persepsi Responden Variabel Z Kesejahteraan Anggota

Terdapat 270 responden yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi, persepsi responden terhadap kesejahteraan anggota koperasi (Z) dengan indikator peluang membiayai pendidikan anggota koperasi (Z₁), peluang memenuhi kebutuhan mengikuti jenjang pendidikan anggota (Z₂), peluang memenuhi kebutuhan

mengikuti kursus keterampilan (Z_3), kelancaran usaha anggota (Z_4), tingkat produktivitas usaha anggota (Z_5), perkembangan pangsa pasar (Z_6), peningkatan volume usaha (Z_7), peningkatan volume penjualan (Z_8), dan peningkatan penghasilan usaha anggota (Z_9).

Dari 9 indikator dari 270 responden, rata-rata responden menjawab tidak pernah sebanyak 4 responden atau 1,6% yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi menjawab tidak pernah, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa keberadaan koperasi belum memberikan peluang kepada anggota dalam memenuhi kebutuhannya sebagai anggota koperasi, selain itu terdapat 34 responden atau 12,7% yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi menjawab jarang, fakta ini menjelaskan bahwa belum optimalnya pengurus koperasi memperluas pangsa pasar atas usaha yang dikelola koperasi.

Terdapat 69 responden atau 25,4% yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi menjawab kadang kala, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa keberadaan koperasi untuk mensejahterakan anggota terkadang terhalang oleh tingkat produktivitas usaha, sehingga peluang mendapatkan pasar belum memenuhi harapan anggota walaupun disadari bahwa perluasan pasar akan mengakibatkan peningkatan volume penjualan yang pada gilirannya koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggota,

Selanjutnya terdapat 92 responden atau 34,0% yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi menjawab sering, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa koperasi sudah mampu meningkatkan volume usaha dan mendapatkan peluang pasar, sehingga koperasi memiliki peluang mensejahterakan anggota melalui kemampuannya membiayai pendidikan dan kursus-kursus demi kemajuan koperasi pesisir yang lebih baik dalam pengelolannya.

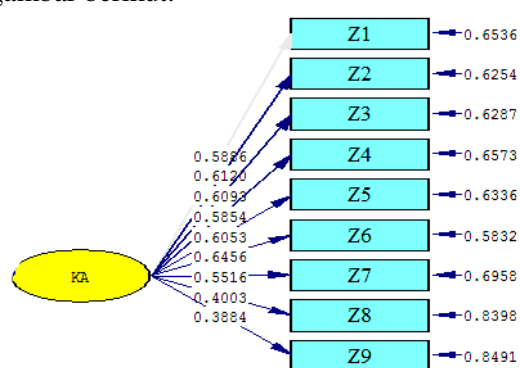
Dan terdapat 71 responden atau 26,3% yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi menjawab selalu. Fakta hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peluang anggota sudah mampu membiayai pendidikan keluarganya sebagai

akibat berhasilnya koperasi pada wilayah pesisir, serta tingkat kelancaran usaha anggota dan penguasaan pasar, sehingga pendapatan koperasi meningkat termasuk anggota koperasi menunjukkan tercapainya tingkat kesejahteraan anggota koperasi.

b. Model Pengukuran Kesejahteraan

Anggota

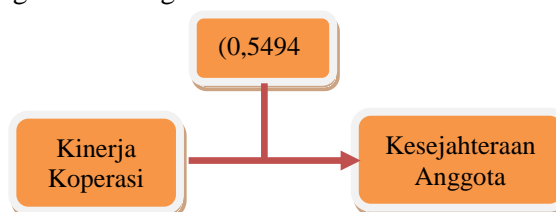
Model pengukuran variabel Kesejahteraan Anggota (Z) terdiri dari tiga dimensi, yaitu: Kesempatan Mengikuti Pendidikan (Z_1), Perkembangan Usaha Anggota (Z_2), dan Perkembangan Profitabilitas Usaha (Z_3). Selanjutnya hubungan dimensi dalam membentuk variabel Kinerja Lembaga Koperasi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Diagram Jalur Model Kesejahteraan Anggota

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari sembilan indikator yang membangun variabel Kesejahteraan Anggota, terdapat beberapa variabel manives yang memiliki kontribusi yang dominan, yaitu: Z_6 (Luas Pasar/perkembangan pangsa pasar), Z_2 (Kebutuhan Pendidikan), dan Z_3 (Kebutuhan Keterampilan).

Model struktural dan pengukuran berdasarkan *full model* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3. Pengukuran Kinerja Kelembagaan terhadap Kesejahteraan anggota

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien jalur kinerja lembaga koperasi

terhadap kesejahteraan anggota koperasi sebesar 0.5494 sehingga besarnya pengaruh langsung variabel kinerja lembaga koperasi terhadap kesejahteraan anggota koperasi diperoleh sebesar $(0.5494)^2 = 0.3014$ atau 30 persen dan bernilai positif, sehingga dapat dikemukakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kinerja lembaga koperasi memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan anggota koperasi Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat dikemukakan bahwa hipotesis ke sembilan diterima, dimana terdapat pengaruh yang signifikan dan bernilai positif kinerja lembaga koperasi terhadap kesejahteraan anggota koperasi.

Pengembangan kinerja lembaga koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh langsung dan bersifat positif variabel kinerja lembaga terhadap kesejahteraan anggota. Untuk membetuk kinerja lembaga koperasi diperlukan indikator-indikator, pertumbuhan usaha koperasi, penambahan hasil usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, pengembangan jumlah usaha yang dikelola koperasi, tingkat pertumbuhan jumlah anggota koperasi, tingkat pertumbuhan penyertaan modal anggota, tingkat pertumbuhan pendapatan anggota, tingkat perkembangan SHU, tingkat efisiensi pengelolaan SHU, dan tingkat penerimaan SHU tepat waktu. Dari indikator-indikator yang membentuk kinerja lembaga koperasi terdapat indikator yang memiliki pengaruh yang cukup besar adalah penambahan pendapatan anggota dan Sisa Hasil Usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu diterima tepat waktu.

Hal itu sejalan yang dikemukakan oleh Moehariono, (2012), Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dalam sebuah lembaga merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan lembaga yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika organisasi telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan

strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan yang memberikan kontribusi pada ekonomi.

Dengan demikian manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Untuk itu dalam memperbaiki kinerja pengurus koperasi dibutuhkan beberapa upaya kongkrit diantaranya adalah semua aktivitas pengurus yang telah diberi amanah mengelola koperasi (*agent*) harus dipertanggungjawabkan di depan para anggota sebagai pihak pemberi amanah (*principal*).

Rapat Anggota Tahunan (RAT) harus dijadikan wahana evaluasi hasil kinerja tahunan para pengurus koperasi sebagai wujud akuntabilitas. Namun demikian secara obyektif disadari bahwa disamping ada koperasi yang sukses dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terdapat pula koperasi di Indonesia bahkan mungkin jauh lebih banyak kuantitasnya yang kinerjanya belum seperti yang kita harapkan. Koperasi pada kategori inilah yang memberi beban psikis dan juga trauma bagi sebagian kalangan akan manfaat berkoperasi.

Koperasi juga diharapkan dapat berperan serta dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini eksistensi koperasi untuk mampu bertahan dalam menghadapi persaingan serta mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya tidak terlepas dari kinerja lembaga yang dibangun melalui perkembangan usaha dan pangsa pasar serta peningkatan penghasilan usaha anggota, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan Visi, Misi dan Prioritas RPJMD Sulawesi Selatan khususnya terkait

uraian 11 (sebelas) program prioritas Gubernur dalam RPJMD 2013-2018, maka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya percepatan untuk mendorong perluasan pertumbuhan ekonomi yang mengedepankan distribusi pendapatan yang lebih merata dan berkeadilan. Maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 menekankan pada beberapa prioritas pembangunan antara lain yaitu; Mengefektifkan Kelembagaan Ekonomi yang Berbasis Masyarakat, Penguatan Ekonomi. Sasaran Indikator Kinerja yang ingin dicapai tentang efektivitas kelembagaan berbasis masyarakat adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jumlah wirausaha dalam pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM;
- 2) Meningkatnya jumlah promosi dalam membangun mekanisme perdagangan dan kelembagaan pasar yang sehat dan berpihak pada pelaku usaha,
- 3) Jumlah SDM pelaku UKM serta Koperasi yang mengikuti Diklat;
- 4) Jumlah UMKM Mandiri,
- 5) Jumlah Koperasi dan UMKM yang terfasilitasi oleh lembaga keuangan bank dan non bank,
- 6) Jumlah produk baru yang difasilitasi sarana dan prasarana dan mendapatkan HAKI yang mengatur pengembangan dan pembinaan Koperasi dan UMKM.

Sehubungan dengan hal tersebut, hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 sebagai berikut : hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 8 Sasaran Strategis dimaksud, sebanyak 6 Sasaran Strategis dengan capaian kinerja dalam kategori Sangat Baik, yakni meningkatnya mutu dan produksi hasil pertanian, terdorongnya industri pengolahan berbasis sumber daya local, meningkatnya kualitas dan meluasnya kesempatan kerja, terluasnya infrastruktur wilayah dan ketersediaan energy, menguatnya ekonomi wilayah dan meningkatnya produksi berbasis masyarakat, dan meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan gerakan sulusel hijau. Sebanyak 1 Sasaran Strategis capaian kinerja dalam kategori Baik, yakni meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan dasar dan 1 Sasaran Strategis capaian kinerja

dalam kategori Cukup, yakni kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat.

Jika dianalisis kinerja koperasi di 3 daerah pesisir di Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kabupaten Takalar. Koperasi pada wilayah pesisir Kota Makassar memiliki nilai korelasi $r = 0,687$, koperasi pada wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nilai $r = 0,791$, dan koperasi pada wilayah pesisir Kabupaten Takalar dengan nilai $r = 0,795$.

Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Untuk itu agar koperasi tetap dapat hidup di sektor ekonomi, maka salah satu teknik penanggulangan kemiskinan adalah menciptakan lapangan kerja, pembangunan pedesaan dan lainnya bahkan pembiayaan usaha kecil dan menengah, termasuk keputusan tentang pengelolaan keuangan yang mempengaruhi kinerja koperasi secara total, Simeyo Otieno, (2013). Menurut Moehariono, (2012), Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis. Kinerja dalam sebuah lembaga merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan lembaga yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika organisasi telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan yang memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Manajemen kinerja bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, fungsi, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan, dan juga di area yang lain.

Brudan (2010) menjelaskan bahwa baik di tingkatan organisasi ataupun individu, salah satu fungsi kunci dari manajemen adalah mengukur dan mengelola kinerja. Antara gagasan, tindakan dan hasil terdapat suatu perjalanan yang harus ditempuh. Dan barangkali istilah yang paling sering

digunakan di keseharian yang memeberikan gambaran tentang perkembangan dari perjalanan tersebut dan juga hasilnya adalah "kinerja" (id.wikipedia.org/.../Manajemen).

Joheeb Ropke, 1997; Garbarino and Johnson 1999, Gruen et al. 2000. Menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan anggota koperasi yang ditunjukkan melalui capaian hasil selama pelak sanaan kegiatan operasional dalam periode tertentu. Prawirosentono (1999) menyatakan bahwa kinerja adalah basil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka nienca.pai tujuan organisasi secara legal, bermoral dart beretika.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1996) dapat dilihat dari empat indikator yaitu (1) rasa aman (*security*), (2) Kesejahteraan (*welfare*), (3) Kebebasan (*freedom*), dan (4) jati diri (*identity*). Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain : (1) sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

Yudtriasnanto, (2011) jadi *sustainable management asset* berfungsi sebagai dasar pengelolaan masyarakat dan asset yang

mereka miliki dalam usaha pencapaian tujuan *sustainable asset management*, dengan *sustainable development* sebagai konsep pembangunan yang berkelanjutan yang kemudian dalam aplikasinya mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan prinsip ekonomi kerakyatan berupa pembentukan masyarakat sebagai pemilik dan pelaksana dari upaya pencapaian kesejahteraan mereka. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan untuk membangun pemberdayaan masyarakat pesisir melalui proses kegiatannya. Indikator kesejahteraan rakyat menurut BPS Indonesia (2014) adalah kependudukan, kesehatan dan Gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan kemiskinan dan sosial lainnya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan, yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*, Albert dan Hahnel, (2005). Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu

adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. Perkembangan lainnya dalam teori kesejahteraan sosial adalah munculnya *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan *new contractarian approach* ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan.

Dari definisi yang telah diuraikan di atas, peneliti berpendapat bahwa kesejahteraan anggota koperasi dapat dicapai jika; anggota koperasi mempunyai peluang membiayai pendidikan keluarga, peluang memenuhi kebutuhan mengikuti kegiatan kursus keterampilan, tingkat kelancaran dan produktivitas usaha anggota, volume usaha dan pendapatan meningkat serta perkembangan pangsa pasar yang lebih meluas.

D. KESIMPULAN

Kontribusi hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa koperasi masyarakat pesisir yang berciri kinerja kelembagaan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas usaha dan perkembangan ekonomi wilayah. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan bernilai positif kinerja lembaga koperasi terhadap kesejahteraan anggota koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- 2015. BPS Kabupaten Pangkep Dalam Angka
- 2015. BPS Kabupaten Takalar Dalam Angka
- 2014. BPS Makassar Dalam Angka
- 2014, BPS Indonesia
- 2015 Kementerian Koperasi dan UKM

- Albert dan Hahnel, 2005. *Classical Utilitarian, Neoclassical Welfare Theory Dan New Contractarian Approach*:
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta : Jakarta.
- AM Yamin 2013. Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, Rakorda antara Dinas Koperasi dan UKM Sulsel dengan dinas yang membidangi se-Sulsel, di Hotel Kenari, Rabu (27/11).
- Brudan.2010. Manajemen Kinerja-Wikipedia ...(download 10 Januari 2015)
- Ghozali, I., 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Universitas Diponegoro Semarang
- Jocheb Ropke, 1997. *Perkembangan Jumlah Anggota memberikan kontribusi terhadap peningkatan SHU*.
- Moehariono, 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*.Ed. Revisi.Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasikun, Dr. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. PT. Tiara Wacana.Yogyakarta.
- Nunnaly, J C, dan I.H. Bernstein, 1994, : "Psychometric Theory", McGraw Hill, 3-rd Edition
- Puspayoga (2016). Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Peringatan Hari Koperasi ke-69 18 Juli Tahun 2016
- Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods for business Edisi I and 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simeyo Otieno, 2013. *An Assessment of Effect of Government Financial Regulations on Financial Performance in Savings and Credit Cooperative Societies (SACCOs): A study of SACCOs in Kisii Central, Kenya* Department of Business and Management School of Business and Economics Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology P.O. Box 210 - 40601 Bondo-Kenya,
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 11. CV. Alfabeta.Bandung.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, CV, Alfabeta, Bandung
- Solimun, 2002. *Multivariate Analysis Structural Equation Modelling (SF_M)*

- Lisrel dan Amos*, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Umar, Husein. 2000. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Yuditriasnanto, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Konsep Sustainable Asset Management dan Prinsip Ekonomi Kerakyatan*. prezi.com/.../perkembangan-konsep-sustainable-d (on line, 2015)
- Zikmund, W.G. (1994), *Business Research Method*, (Fourth edition), The Dryden Press, Harcourt College Publisher.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No.25 Tentang Perkoperasian